

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Triwulan III di pengaruhi oleh perubahan harga yang fluktuatif pada beberapa komoditas utama. Pada Triwulan III ini Kota Cirebon mengawali dengan terjadi inflasi bulanan sebesar 0,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,32 menjadi yang tertinggi dari 10 Kota pantauan IHK di Jawa Barat, sedangkan pada Bulan Agustus terjadi deflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,99 dan Bulan September kembali mengalami inflasi sebesar 0,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,30.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sebaliknya deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Inflasi pada bulan Juli terutama disebabkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (beras, bawang merah, telur ayam ras). Hal ini disebabkan keterbatasan pasokan gabah kering dan bawang merah pasca panen raya. Selain itu inflasi juga dipengaruhi biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Deflasi yang terjadi di bulan Agustus terutama disebabkan oleh meningkatnya pasokan komoditas pangan sejalan dengan penyaluran bantuan pangan dan panen komoditas tanaman hortikultura. Sedangkan inflasi bulan September didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan kegiatan keagamaan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada bulan September juga andil inflasi disumbang oleh kenaikan biaya Akademi/Perguruan Tinggi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi terkait Perkembangan Harga yang terjadi selama Triwulan III 2025 antara lain:

- a. Inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya harga beras karena berkurangnya persediaan gabah serta biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli.
- b. Di awal bulan Juli realisasi SPHP masih terhambat, belum ada keputusan penyaluran untuk wilayah Jawa.
- c. Mekanisme penyaluran bantuan pangan pemerintah sepenuhnya dipegang BULOG tidak lagi bekerjasama dengan PT.POS, sehingga terkendala dengan kapasitas penyimpanan beras yang langsung di distribusikan di setiap Kelurahan.
- d. Deflasi terjadi di Bulan Agustus dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan beras sejalan adanya distribusi bantuan pangan dan peningkatan pasokan hortikultura pasca panen raya.
- e. Pada bulan September inflasi dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan daging ayam ras dan peningkatan biaya akademi/perguruan tinggi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cirebon dalam mengendalikan inflasi di Kota Cirebon:

Melaksanakan monitoring harga dan ketersediaan komoditas di Pasar Tradisional dan Retail Modern.

- b. Mengadakan Operasi Pasar Murah Komoditas dan Gerakan Pangan Murah;
- c. Mengadakan Bazar Mall UKM KLEMPRAKAN;
- d. Pelaporan data Harga Pangan di Kota Cirebon melalui Aplikasi E-Tuku yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi SILINDA milik Provinsi Jawa Barat dan Sistem SP2KP milik Kementerian Perdagangan;
- e. Pelaporan perkembangan harga harian bahan pangan pokok strategis masyarakat dan kegiatan pengendalian inflasi dilaksanakan setiap hari oleh Inspektorat Kota Cirebon, melalui [wasinflasi.kemendagri.go.id](http://wasinflasi.kemendagri.go.id);
- f. Melakukan Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- g. Mengikuti *Capacity Building* TPID Penyusunan *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2025-2027 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- h. Mengikuti *Capacity Building* TPID se-Jawa Barat;
- i. Memantau serta mempercepat distribusi Bantuan Pangan Pemerintah ke Masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Koordinasi pelaksanaan program pengendalian inflasi antar anggota TPID dan Instansi/Lembaga;
- b. Kelancaran Distribusi terus dijaga;
- c. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang tepat sasaran;
- d. Pemantauan harga komoditas;
- e. Optimalisasi pola komunikasi efektif sehingga perumusan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Program Operasi Pasar Murah Komoditas & Gerakan Pangan Murah dalam rangka menekan harga pangan komoditas;
- b. Penguatan peran Warung Peduli Inflasi dalam penyediaan komoditas pangan strategis serta penguatan gerakan *urban farming* dikalangan ASN dan kelompok PKK;
- c. Pemeliharaan kondisi jalan dan rambu-rambu penerangan untuk kelancaran distribusi;
- d. Mengoptimalkan peran anggota TPID, Satgas Pangan, untuk komunikasi himbauan belanja bijak.

a.